

KETERLIBATAN AKTOR INTERNASIONAL NON NEGARA DALAM MEMPENGARUHI ISU LINGKUNGAN DI INDONESIA

Danang Eko Prastya¹, Abitassha Az Zahra²

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: danang.eko.psc20@mail.umy.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: abitasshaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui keterlibatan peran aktor internasional non negara dalam gerakakan social movement yang berkaitan dengan isu lingkungan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan *analysis social networking* untuk melihat pola komunikasi dalam #Tolak PLTU Batang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan fitur Ncapture pada NVivo 12 Plus dengan mengcapture beberapa user Twitter dengan peringkat tertinggi. Analysis Data dengan menggunakan fitur Cluster Analysis pada NVivo 12 Plus untuk melihat *correlation* antara pengguna *Twitter User* teratas dalam pola komunikasi #TolakPLTUBatang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa akun bodong yang terlibat dalam jejaring pola komunikasi sosial dalam #TolakPLTUBatang yang ternyata memiliki pola relasi dengan komunitas GreenpeaceID. Sebagai komunitas lingkungan yang menjadi aktor terdepan gerakan *social movement* penolakan pembangunan PLTU Batang penggiringan opini publik menggunakan beberapa akun bodong untuk kemudian semakin membuat masyarakat tergiring dalam gerakan social movement tersebut. Dapat dilihat dalam jejaring sosial tersebut bahwa 50% lebih pengguna user Twitter peringkat teratas merupakan akun bodong. Oleh sebab itu, aktivitas *cyber activism* melalui pemberian informasi yang menyangkut isu global seperti isu lingkungan mejadi alasan para internasional aktor non negara ini ikut terlibat dalam menyuarakan isu tersebut.

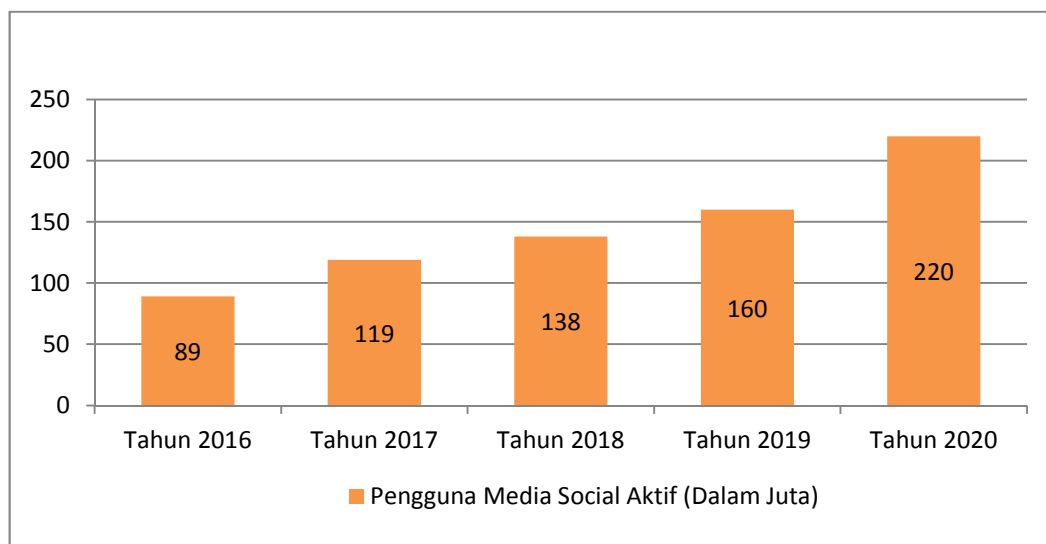
Kata Kunci: *Non Governmental Organization (NGO); Social Movement; Global Governance*

PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pola komunikasi masyarakat di era digital (Yawised, Ellis, & Wong, 2018). Penggunaan media sosial pada kehidupan bermasyarakat menjadi faktor pendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan Pemerintahan (Pardo, Nam, & Burke, 2012). Meskipun, pada akhirnya penggunaan media sosial memberikan sebuah tantangan baru pada beberapa konteks seperti *privacy, social inclusion, isu governance*, serta aksesibilitas Pemerintah (Boulianne, 2015). Tingkat respon masyarakat di era digitalisasi terbukti lebih responsif menyadari adanya suatu hal negatif dalam suatu pelaksanaan kebijakan Pemerintah, sehingga penggunaan media sosial sangat membantu dalam fungsi monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

Meskipun, tingkat respon yang tinggi menjadi peluang yang besar bagi para oknum untuk menyebarkan beberapa isu panas. Sehingga, obyektifitas informasi media sosial sangat penting

ditekankan. Walaupun, tidak bisa dipungkiri bahwa unsur-unsur lain seperti politik, lingkungan atau bahkan isu global lainnya bisa menjadi alasan dari berbagai isu yang dibuat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas *cyber activism* (Chaput, 2019). Dengan menggunakan peran besar *cyber activism* saat ini gerakan sosial sangat mudah untuk dibentuk. Bahkan, peran *cyber activism* ini sendiri dengan didukung dengan sosial media menghilangkan batasan-batasan yang muncul.



Gambar 1.
Data Pengguna Media Sosial Aktif
Sumber: Kementrian Komunikasi dan Informasi Indonesia, 2019

Data Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menunjukkan data pengguna user media sosial di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2019 angka pengguna media sosial di Indonesia mencapai 160 juta pengguna aktif. Angka tersebut meningkat hingga 22 juta pengguna user media aktif dibandingkan pada Tahun 2018. Pada tahun 2018 pengguna media sosial aktif hanya mencapai 138 juta pengguna. Dari data yang ada dapat kita lihat bahwa pengguna user media di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Bahkan meningkat sekitar hampir rata-rata 20 juta pengguna setiap tahunnya. Sehingga dengan besarnya pengguna media sosial yang aktif di Indonesia tidak heran jika respon masyarakat sangat aktif dalam berbagai kegiatan serta isu-isu publik pada media sosial. Bahkan tahun 2020, pengguna media sosial aktif mencapai 220 juta pengguna.

Sejalan dengan meningkatnya pengguna media sosial, presentase pengguna Twitter di Indonesia dari tahun ke tahun juga terus mengalami kenaikan yang pesat. Pada Tahun 2019 pengguna Twitter di Indonesia bahkan mencapai 52% dari total keseluruhan pengguna media sosial aktif. Meskipun presentase pengguna aktif pada Twitter hanya berada peringkat keempat dibandingkan aplikasi sosial lainnya seperti instagram, facebook, dan youtube. Akan tetapi, dalam Gambar 2 dapat kita lihat bahwa presentasi dari penggunaan twitter dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, tahun 2020 mencapai lebih dari 60% dari total pengguna sosial media aktif.



Gambar 2.

Persentase Pengguna Twitter di Indonesia

Sumber : Kementrian Komunikasi dan Informasi Indonesia, 2019

Intensitas yang tinggi pada pengguna media sosial berdampak pada munculnya gerakan perubahan sosial akar rumput yang pada akhirnya memberikan gerakan baru (Mustaqim, 2018). Selain dampak terkait dengan pergerakan informasi yang bergerak lebih cepat, peran para aktivis atau disebut dengan *cyber activism* tidak bisa dilepaskan ikut bermain di balik serangkaian pemberian informasi yang tentunya memberikan pengaruh yang besar dalam menimbulkan gerakan kolektif yang berkaitan dengan isu global (Baum & Potter, 2019). Hal ini yang kemudian kita sebut dengan *cyber space* atau ruang *cyber* pada sosial media (Tadic, Rohde, & Wulf, 2018). Hal ini juga yang melatarbelakangi gerakan hastag #TolakPLTU Batang dalam media sosial Twitter, dimana masyarakat banyak yang kemudian menolak kebijakan pembangunan PLTU Batang tersebut. Hal ini tidak terlepas dari opini masyarakat mengenai isu lingkungan dan matinya mata pencaharian masyarakat di daerah yang terdampak pembangunan PLTU tersebut. Selain itu, tempat pemilihan pembangunan PLTU yang digadang akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara ini juga menjadi masalah lain. Rencana daerah yang akan dibangun sebagai wilayah PLTU Batang ini adalah Karanggeneng, Ujungnegoro, dan Ponwring yang merupakan kawasan padat penduduk. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana peran organisasi internasional non negara mampu ikut terlibat dalam mempengaruhi perspektif masyarakat terkait dengan isu lingkungan sehingga menimbulkan sebuah gerakan sosial yang besar sebagai bentuk respon terhadap suatu kebijakan.

LITERATURE REVIEW

Dampak Perkembangan Media Sosial dalam *Global Governance*

Pesatnya perkembangan zaman saat ini merubah tatanan kehidupan dari era tradisional menuju suatu tatanan era yang baru (Bailey, 2018). Era baru yang dimaksudkan adalah era *E-Government*

dimana kemudian memungkinkan untuk semua terhubung dengan Internet. Penggunaan media sosial sebagai turunan dari konsep web 2.0 juga mengalami pergeseran sebagai bentuk baru transformasi *e-government* (Duymu et al., 2017). Web 2.0 memang memungkinkan bagi para penggunanya untuk saling berkolaborasi dan bertukar sebuah *content* (Baum & Potter, 2019). Penggunaan media sosial saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai sebuah alat untuk berinteraksi, akan tetapi memberikan kesempatan untuk masyarakat agar mampu berinteraksi jauh terhadap suatu fungsi Pemerintah (Loukis, Charalabidis, & Androutsopoulou, 2017). Sehingga, media sosial saat ini sangat memberikan benefit yang besar bagi reformasi hubungan antara masyarakat dan Pemerintah (Gofur, 2017). Tidak hanya sebatas hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan melainkan sudah lebih pada interkasi baru dimana saling dapat memberikan manfaat dari adanya penggunaan media sosial tersebut. Tidak bisa dipungkiri memang pengimplementasian ICT di era sekarang memang secara teoritis mampu menjadikan konstruksi baru dalam hubungan anantara Pemerintah dan masyarakat (Bertot, Jaeger, & Hansen, 2012).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pergerakan informasi dalam sosial media bergerak sangat cepat (Zheng, Le, Chan, Hu, & Li, 2016). Hal ini tidak bisa terlepas dari organisasi profesional yang dalam hal ini memproduksi berbagai macam berita dalam sosial media (Miller, 2018). Organisasi yang dalam hal ini adalah pelaku media yang memiliki peranan besar dalam mempengaruhi isu-isu publik dan menjadikan isu tersebut perdebatan dalam sosial media (Baum & Potter, 2019). Bahkan, dalam konteks era digital seperti ini masyarakat yang merupakan pengguna dari media sosial itu sendiri juga mampu membuat berbagai pesan informasi sesuai dengan tujuan dari masyarakat tersebut, hal ini sering disebut sebagai *civil journalism* (Mutsvairo & Wasserman, 2016).

Perkembangan informasi yang cepat serta aksesibilitas yang mudah menjadikan penggunaan media sosial mampu menghilangkan batasan yang ada sehingga menjadikan mudahnya suatu aktor baik aktor negara ataupun non negara untuk ikut terlibat dalam mempengaruhi suatu isu melalui penyebaran informasi dalam sosial media (Kim & Xu, 2019). Oleh sebab itu, perkembangan pesat dari sosial media memberikan dampak besar pada konsep *global governance* (Hansen & Porter, 2017). Hal ini dikarenakan semua aktor internasional dapat dengan mudah menerobos batasan yang sebelumnya ada melalui penggunaan sosial media (Bailey, 2018).

Global governance relatif berbeda dan tidak membentuk hierarki utuh dengan konsep *good governance*, *good public governance* ataupun *good corporate governance* (Chenou & Radu, 2019; Duberry, 2019). Hal ini karena *global governance* berangkat dari isu bersama yang dihadapi serta beroperasi pada tataran di luar batas negara, sehingga ini menjadi alasan bagi institusi negara maupun non negara untuk bersama-sama menggarap sebuah isu bersama (Popiden, 2016). Hal ini karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan terhadap isu tersebut (Dingwerth & Pattberg, 2006). Oleh sebab itu, aktor atau pelaku yang pada umumnya terlibat dalam *global governance* antara lain organisasi antar pemerintah, *inter-governmental organizations (IGOs)*, *Civil Society Representatives*,

Economic and International-Finance Actors, negara serta kelompok-kelompok internasional informal (NGOs).

Cyber Activism dalam Pergerakan Social Movement di Era Digital

Masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan bagaimana kemudian Pemerintah menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Khan, Yoon, Kim, & Park, 2014). Akan tetapi, masyarakat cenderung lebih pada bagaimana kemudian Pemerintah mampu melaksanakan kegiatan Pemerintahan secara efektif sesuai dengan masukan dari masyarakat melalui sosial media (van den Berg & Verhoeven, 2017). Social media harus dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah sehingga mampu memberikan manfaat yang besar dalam suatu pengambilan keputusan agar nantinya keputusan itu dapat dijalankan secara baik oleh masyarakat (C. K, Singh; Pushpendu, 2020). Meskipun memang dalam sosial media banyak terjadi gerakan politik yang kemudian saling mempengaruhi statement masyarakat terhadap suatu kebijakan (Zavattaro & Bryer, 2016). Sesuai dengan konsep *good governance* maka Pemerintah dituntut untuk mampu mengembangkan sebuah program khusus untuk mampu melihat topik apa yang kemudian muncul dalam media sosial untuk nantinya dijadikan sebuah pertimbangan dalam pengambilan kebijakan (Heiss & Matthes, 2019).

Fungsi dari sosial media itu sendiri memang saat ini harus mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi guna mewujudkan *good governance* (Hsieh, Hsieh, & Vu, 2019). Artinya bahwa dengan pengurangan kesenjangan tersebut maka masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan suatu keputusan Pemerintah (Szabla & Blommaert, 2020). Pengurangan kesenjangan khususnya dalam hal partisipasi memang sudah terus meningkat bahkan tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk stakeholders lainnya. Akan tetapi, memang dalam konteks lingkup politik sosial media masih belum menunjukkan keterlibatan dalam pengurangan kesenjangan politik (Harding, 2019).

Kenyataan bahwa sosial media hanya sebagai wadah dalam menyerap informasi dari masyarakat tanpa kemudian melibatkan masyarakat tersebut dalam pengambilan suatu keputusan masih menjadi permasalahan yang sulit meskipun kesenjangan partisipasi sudah mampu dipangkas (Rahayu, Utari, & Wijaya, 2019). Sehingga sosial media tidak dijadikan sebagai ruang untuk interaksi warga dan Pemerintah melainkan hanya sebagai pelengkap dalam era digital saat ini (Aldrich, Gibson, Cantijoch, & Konitzer, 2016).

Meskipun, tidak bisa menyalahkan Pemerintah secara sepihak karena masyarakat yang aktif dan responsif juga harus menjadi titik perhatian (Dumitrica & Felt, 2019). Masyarakat yang aktif dan responsif akan cenderung lebih tanggap dalam memberikan komentar pada postingan sebuah kebijakan (Pintak, 2019). Meskipun pada faktanya bahwa masyarakat hanya memberikan like dan share saja tanpa memberikan timbal balik kepada Pemerintah (Georgiou, Georgiou, & Schafer, 2019). Hal ini memang termasuk dalam bentuk peningkatan partisipasi masyarakat, akan tetapi bukan

peningkatan partisipasi yang baik karena tidak ada timbal balik terhadap Pemerintah (Wang, Wang, & Che, 2019).

Padahal apabila masyarakat tersebut mampu memberikan timbal balik secara besar maka akan menjadikan sebuah gerakan sosial yang nantinya mampu memberikan dampak yang besar terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Lim, 2017). Oleh sebab itu, sebenarnya masyarakat dan Pemerintah harus saling bersinergi untuk meningkatkan hubungan tersebut sehingga terjalin partisipasi yang baik tidak hanya sekedar partisipasi yang bersifat pasif tanpa memberikan timbal balik apapun terhadap suatu kebijakan tersebut (Wahyono, Amalia, & Ranteallo, 2017). Karena apabila saling memiliki ideologi yang sama maka menimbulkan adanya suatu gerakan perubahan politik dan sosial akar rumput yang pada akhirnya akan memberikan gerakan teori politik (Manzoor, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji terkait isu pembangunan PLTU Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Isu utama dalam penelitian ini adalah pada gerakan sosial yang timbul dengan mengukung gerakan penolakan yang awalnya dilakukan oleh komunitas aktivis besar yang bergerak dalam lingkup lingkungan yakni @GreenpeaceID serta beberapa masyarakat di Kabupaten Batang yang kemudian menjadi sebuah gerakan sosial Nasional dengan hastag #TolakPLTUBatang.

Peneliti menggunakan metode *analysis social networking* untuk melihat pola komunikasi dalam #Tolak PLTU Batang. Dalam proses pengambilan data pengguna Twitter yang terlibat dalam pola komunikasi tersebut, peneliti menggunakan fitur Ncapture pada NVivo 12 Plus dengan mengcapture beberapa user Twitter dengan peringkat tertinggi. Untuk Analysis Data peneliti menggunakan fitur Cluster Analysis pada NVivo 12 Plus untuk melihat *correlation* antara pengguna *Twitter User* teratas dalam pola komunikasi #TolakPLTUBatang.

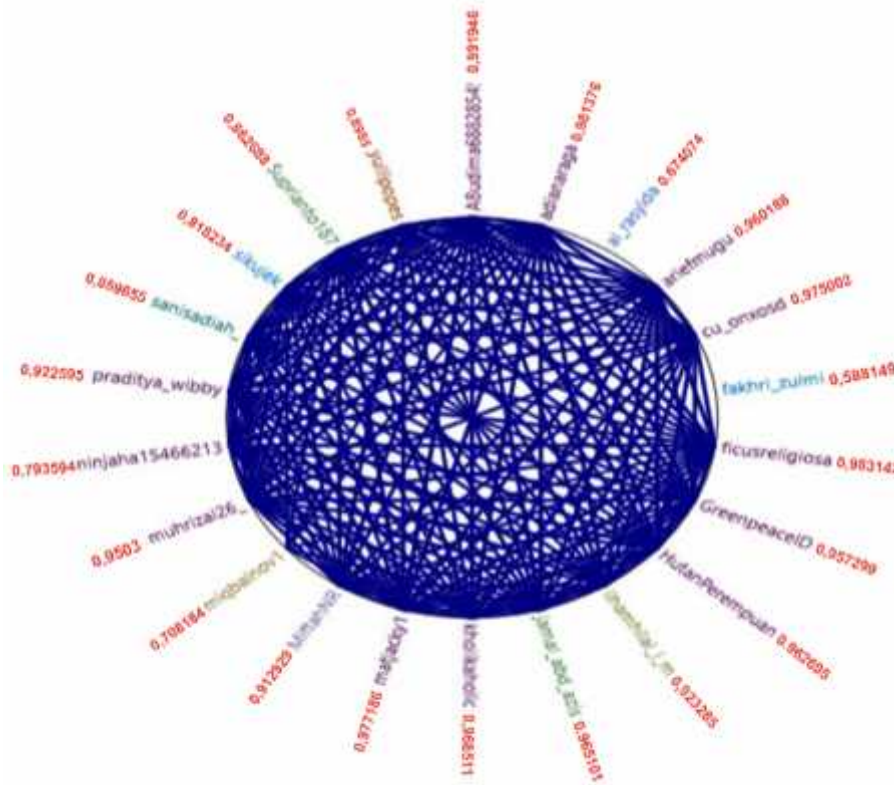
HASIL DAN DISKUSI

Peran *Internasional Cyber Activism* dalam Isu Lingkungan Pembangunan PLTU Batang

Dari data hasil pola komunikasi tersebut terlihat bahwa terdapat user Twitter NGO's Internasional terbesar yang fokus dalam isu lingkungan terlibat dalam gerakan sosial tersebut. NGO's Internasional yang terlibat yakni Greenpeace. Greenpeace sendiri merupakan organisasi non Pemerintah yang berfokus pada masalah isu lingkungan. Hal ini tentu mengindikasikan bahwasanya peran NGO's Internasional sebagai salah aktor *global governance* memiliki peran besar dalam pemberian sebuah informasi kepada publik dengan menyuarakan isu global yakni isu lingkungan. Bahkan pada Gambar 3, dapat kita lihat bahwa nilai korelasi dari NGO's tersebut memiliki nilai korelasi yang tertinggi yakni 0,95.

Hal ini sesuai dengan konsep *cyber activism* sebagai penyebar informasi utama dalam sebuah pola jejaring sosial (Mustaqim, 2018). *Cyber activism* bertindak sebagai media mainstream dalam

sebuah konsep media sosial. Artinya bahwa *cyber activism* berperan menjadi aktor utama dalam penyebaran informasi dalam pola jejaring sosial tersebut.



Gambar 1.
Cluster Analysis User Twitter on Social Movement #Tolak PLTU Batang
Sumber: Nvivo 12 Plus

Selanjutnya, berdasarkan pola jejaring sosial pada gambar 3, dapat kita lihat bahwa 20 akun Twitter dengan peringkat tertinggi secara berturut-turut memiliki pola hubungan yang terpusat pada akun @praditya_wibby. Sehingga memang dapat dikatakan bahwa akun @praditya_wibby menjadi akun kedua yang berperan dalam penyebaran informasi dan penggiringan opini publik untuk menolak sebuah kebijakan PLTU di Kabupaten Batang (Baum & Potter, 2019). Hal ini sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru dalam dunia *cyber activism* dimana para aktivis bermain menggiring opini publik menggunakan beberapa akun lain untuk semakin membesarkan isu tersebut (Androusoyopoulou, Charalabidis, & Loukis, 2018).

Dalam konteks media sosial para aktivis sudah ikut berperan dalam pemberian informasi kepada publik guna menciptakan gerakan kolektif melalui gerakan akar rumput. Akun lain yang bukan merupakan akun resmi dari komunitas tersebut menjadi akun pendukung untuk kemudian menyebarkan kepada akun NGO's lain agar gerakan tersebut semakin *massive*. Akun tersebut sengaja dibuat untuk meyakinkan masyarakat guna percaya akan sebuah suatu isu publik. Akun yang sering digunakan dalam penggunaan penggiringan isu publik yakni disebut akun *anonymous*.

Dalam konteks jejaring sosial pada penolakan PLTU Batang dapat kita lihat bahwa dari 20 akun pada peringkat teratas lebih dari 50% merupakan akun yang dikategorikan sebagai anonymous. Sedangkan untuk akun privat hanya berkisar pada 7 akun saja. Dari hal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya para aktivis bergerak dibelakang layar dalam gerakan sosial tersebut. Permainan dibelakang layar oleh para aktivitas ini sering disebut dengan konsep *cyber activism*, *cyber activism* sendiri merupakan gerakan yang dilakukan oleh aktivis guna menggiring opini publik melalui berbagai strategi pada suatu ruang *cyber* (Chaput, 2019).

Pada penggunaan penggiringan opini publik ini biasanya para aktivis cenderung menutup diri dan menggunakan akun bodong seperti pada kasus penolakan PLTU Batang tersebut. Dari data hasil di atas dapat kita lihat bahwa korelasi antara akun Twitter yang muncul pada #TolakPLTUBatang memiliki keterkaitan dengan akun sosial media milik GreenpeaceID selaku komunitas yang paling menolak dalam pembangunan PLTU Batang. Artinya pengguna Twitter dalam jejaring sosial gerakan #TolakPLTUBatang ternyata memiliki kaitan erat dengan Komunitas GreenpeaceID meskipun secara tidak langsung GreenpeaceID tidak terlibat langsung dalam penggiringan opini publik untuk menjadikan gerakan sosial movement #TolakPLTUBatang.

Situs jejaring online di era seperti sekarang ini memang menjadi wadah bagi suatu gerakan online dimana dalam gerakan tersebut sering berkaitan dengan penolakan pada sebuah kebijakan (Montalvan Castilla & Pursiainen, 2019). Hal ini sesuai dengan konsep global governance dimana adanya keterlibatan dari aktor internasional lain terlibat dalam beberapa isu global. Isu global yang diangkat dalam hal ini adalah isu lingkungan.

KESIMPULAN

Beberapa akun bodong yang terlibat dalam jejaring pola komunikasi sosial dalam #TolakPLTUBatang ternyata memiliki pola relasi dengan komunitas GreenpeaceID. Sebagai komunitas lingkungan yang menjadi aktor terdepan gerakan *social movement* penolakan pembangunan PLTU Batang penggiringan opini publik menggunakan beberapa akun bodong untuk kemudian semakin membuat masyarakat tergiring dalam gerakan social movement tersebut. Dapat dilihat dalam jejaring sosial tersebut bahwa 50% lebih pengguna user Twitter peringkat teratas merupakan akun bodong.

Oleh sebab itu, aktivitasitas *cyber activism* melalui pemberian informasi yang menyangkut isu global seperti isu lingkungan menjadi alasan para internasional aktor non negara ini ikut terlibat dalam menyuarakan isu tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep global governance sendiri dimana melibatkan beberapa aktor internasional yang memiliki kesamaan isu. Sehingga, masyarakat pengguna sosial media harus lebih selektif dalam memilih konten berita yang disebar oleh beberapa *cyber activism* tersebut. Dominasi yang kuat akan konsep Post-Truth dalam penggunaan media sosial harus segera diatasi agar tidak menimbulkan gerakan sosial yang merugikan Pemerintah dan masyarakat.

Referensi

- Aldrich, J. H., Gibson, R. K., Cantijoch, M., & Konitzer, T. (2016). Getting out the vote in the social media era. *Party Politics*, 22(2), 165–178. <https://doi.org/10.1177/1354068815605304>
- Androutsopoulou, A., Charalabidis, Y., & Loukis, E. (2018). Policy Informatics in the Social Media Era: Analyzing Opinions for Policy Making. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 11021 LNCS, 129–142. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98578-7_11
- Bailey, E. A. (2018). *Social media use, online political discussion and UK political events 2013-2018: a phenomenographic study*.
- Baum, M. A., & Potter, P. B. K. (2019). Media, public opinion, and foreign policy in the age of social media. *Journal of Politics*, 81(2), 747–756. <https://doi.org/10.1086/702233>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Hansen, D. (2012). The impact of polices on government social media usage: Issues, challenges, and recommendations. *Government Information Quarterly*, 29(1), 30–40. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.04.004>
- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: a meta-analysis of current research. *Information Communication and Society*, 18(5), 524–538. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>
- C. K., Singh; Pushpendu, R. (2020). Challenges and Privacy Concerns of the Citizens in Digital and Social Media Era | Studies in Indian Place Names. Retrieved June 10, 2020, from Journal Studies in Indian Place Names website: <https://archives.tpsindia.org/index.php/sipn/article/view/1974>
- Chaput, C. (2019). *Activism and Rhetoric: Theories and Contexts for Political Engagement* - Google Books. Retrieved January 26, 2020, from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Mk7ADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT117&dq=cyberspace+activist+strategy&ots=e9I8iMPU3D&sig=JmAijETfKemxCs5DJuaSEqurjaY&redir_esc=y#v=onepage&q=cyberspace+activist+strategy&f=false
- Chenou, J. M., & Radu, R. (2019). The “Right to Be Forgotten”: Negotiating Public and Private Ordering in the European Union. *Business and Society*. <https://doi.org/10.1177/0007650317717720>
- Dingwerth, K., & Pattberg, P. (2006). Global governance as a perspective on world politics. *Global Governance*. <https://doi.org/10.1163/19426720-01202006>
- Duberry, J. (2019). Global environmental governance in the information age: Civil society organizations and digital media. In *Global environmental governance in the information age: Civil society organizations and digital media*. <https://doi.org/10.4324/9781315109596>
- Dumitrica, D., & Felt, M. (2019). Mediated grassroots collective action: negotiating barriers of digital activism. *Information, Communication & Society*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1618891>
- Duymu, T. M., Karadeniz, H., ükür, E., Atıç, R., Zehir, S., & Azboy, . (2017). Social media and Internet usage of orthopaedic surgeons. *Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma*, 8(1), 25–30. <https://doi.org/10.1016/j.jcot.2016.10.007>
- Georgiou, L., Georgiou, L., & Schafer, B. (2019). Open and Fair Trial in the Social Media Era – An Insurmountable Conflict or an Emerging Opportunity? *European Journal of Law and Technology*, 10(1). Retrieved from <http://ejlt.org/article/view/670>
- Gofur. (2017). *Peranan Cyberspace Sebagai Pembentuk Aktivisme Politik Internet Di Indonesia*.
- Hansen, H. K., & Porter, T. (2017). What do big data do in global governance? *Global Governance*. <https://doi.org/10.1163/19426720-02301004>
- Harding, N. (2019). Instagraff—The Influence of Web 2.0, Social Media, and User-Created Content

- Upon Graffiti Culture Performed in Cyber/Space. In *Crime, Deviance and Popular Culture* (pp. 259–286). https://doi.org/10.1007/978-3-030-04912-6_11
- Heiss, R., & Matthes, J. (2019). Does incidental exposure on social media equalize or reinforce participatory gaps? Evidence from a panel study. *New Media & Society*, 21(11–12), 2463–2482. <https://doi.org/10.1177/1461444819850755>
- Hsieh, H. C., Hsieh, Y. C., & Vu, T. H. C. (2019). How social movements influence crowdfunding success. *Pacific Basin Finance Journal*, 53, 308–320. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.11.008>
- Khan, G. F., Yoon, H. Y., Kim, J., & Park, H. W. (2014). From e-government to social government: Twitter use by Korea's central government. *Online Information Review*, 38(1), 95–113. <https://doi.org/10.1108/OIR-09-2012-0162>
- Kim, H., & Xu, H. (2019). Exploring the effects of social media features on the publics' responses to decreased usage CSR messages. *Corporate Communications*, 24(2), 287–302. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-10-2017-0095>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Loukis, E., Charalabidis, Y., & Androutsopoulou, A. (2017). Promoting open innovation in the public sector through social media monitoring. *Government Information Quarterly*, 34(1), 99–109. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.09.004>
- Miller, S. (2018). Zombie Anti-Communism? Democratization and the Demons of Suharto-Era Politics in Contemporary Indonesia. In *The Indonesian Genocide of 1965* (pp. 287–310). https://doi.org/10.1007/978-3-319-71455-4_15
- Montalvan Castilla, J. E., & Pursiainen, C. (2019). Cyberspace Effects on Civil Society. The Ultimate Game-Changer or Not? *Journal of Civil Society*, 15(4), 392–411. <https://doi.org/10.1080/17448689.2019.1672288>
- Mustaqim. (2018). POST-TRUTH, MEDIA SOSIAL, DAN MISINFORMASI: PERGOLAKAN WACANA POLITIK PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2019 | JATMIKO | Jurnal Dakwah Tabligh. Retrieved January 26, 2020, from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/9529>
- Mutsvairo, B., & Wasserman, H. (2016). Digital activism in the social media era: Critical reflections on emerging trends in sub-Saharan Africa. In *Digital Activism in the Social Media Era: Critical Reflections on Emerging Trends in Sub-Saharan Africa*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-40949-8>
- Pardo, T. A., Nam, T., & Burke, G. B. (2012). E-Government Interoperability. *Social Science Computer Review*, 30(1), 7–23. <https://doi.org/10.1177/0894439310392184>
- Pintak, L. (2019). Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy. *European Journal of Communication*, 34(1), 103–106. <https://doi.org/10.1177/0267323118824881>
- Popiden, S. (2016). Global governance. In *Encounters with World Affairs: An Introduction to International Relations*. <https://doi.org/10.32387/prokla.v29i116.808>
- Rahayu, W. H., Utari, P., & Wijaya, M. (2019). The Motivation of Hoax Message Recipients in the Process of Disseminating Hoax Information on Facebook Group. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4), 414. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i4.1015>
- Szabla, M., & Blommaert, J. (2020). Does context really collapse in social media interaction? *Applied Linguistics Review*, 11(2), 251–279. <https://doi.org/10.1515/applirev-2017-0119>

- Tadic, B., Rohde, M., & Wulf, V. (2018). CyberActivist: Tool for Raising Awareness on Privacy and Security of Social Media Use for Activists. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 10913 LNCS, 498–510. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91521-0_36
- van den Berg, A. C., & Verhoeven, J. W. M. (2017). Understanding social media governance: seizing opportunities, staying out of trouble. *Corporate Communications*, 22(1), 149–164. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-06-2015-0035>
- Wahyono, E., Amalia, R., & Ranteallo, I. C. (2017). Menelaah Lebih Dekat “Post Factual/Post Truth Politics, Studi Kasus Brexit” (Analsis Resensi Media). *Nyimak (Journal of Communication)*, 1(1). <https://doi.org/10.31000/nyimak.v1i1.272>
- Wang, J. C., Wang, Y. Y., & Che, T. (2019). Information sharing and the impact of shutdown policy in a supply chain with market disruption risk in the social media era. *Information and Management*, 56(2), 280–293. <https://doi.org/10.1016/j.im.2018.09.005>
- Yawised, K., Ellis, L., & Wong, M. C. (2018). The Role And Nature Of SCRM In Australian Private Sector: An Exploraty Study. *Asia Pacific Institute of Advanced Research*. <https://doi.org/10.25275/apjcectv4i1edu16>
- Zavattaro, S. M., & Bryer, T. A. (2016). Social media for government: Theory and practice. *Social Media for Government: Theory and Practice*, 103(3), 1–229. <https://doi.org/10.4324/9781315643564>
- Zheng, X., Le, Y., Chan, A. P. C., Hu, Y., & Li, Y. (2016). Review of the application of social network analysis (SNA) in construction project management research. *International Journal of Project Management*, 34(7), 1214–1225. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.06.005>